



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAMALUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
3. NHK : 519405

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.345.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/120 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 139.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/90 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 721 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 281 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000
5. Tanah Seluas 1327 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/200 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah Seluas 206 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 51.500.000
9. Tanah Seluas 8488 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
10. Tanah Seluas 891 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 133.650.000
11. Tanah Seluas 1418 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
12. Tanah Seluas 2446 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
13. Tanah Seluas 314 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 54.950.000
14. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/112 m2 di KOTA BANDA



ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000

15. Tanah Seluas 227 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

16. Tanah Seluas 4702 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

17. Tanah Seluas 364 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

18. Tanah Seluas 2199 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

19. Tanah Seluas 4421 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

20. Tanah Seluas 372 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

21. Tanah Seluas 205 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/120 m2 di KOTA BANDA
ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **295.600.000**

1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
15.600.000

3. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
268.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **146.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **2.203.731.531**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **5.990.531.531**

III. HUTANG Rp. **19.286.264**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **5.971.245.267**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 672388

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.262.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/120 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 9956 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 2600 m2 di BIREUEN, WARISAN Rp. 312.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 285.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.350.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.624.350.000

III. HUTANG Rp. 240.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.384.350.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : BIDANG SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRMAYANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
3. NHK : 662187

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.072.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/216 m2 di ACEH BESAR,
HASIL SENDIRI Rp. 1.072.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 163.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.950.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 125.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.390.950.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.390.950.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : BIDANG BAHASA DAN SENI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBURHAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG BAHASA DAN SENI**
3. NHK : **662188**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/270 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di ACEH TENGGARA, WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **175.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI L300 PIC UP Tahun 2000, LAINNYA Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **519.450.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **99.022.403****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **1.673.472.403****III. HUTANG** **Rp.** **115.342.324****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **1.558.130.079**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUZAKKIR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI
3. NHK : 661708

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/120 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 496.000.000

III. HUTANG Rp. 154.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 342.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PEMASARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMADHANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMASARAN
3. NHK : 671896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.118.800

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/280 m2 di ACEH BESAR,
HASIL SENDIRI Rp. 6.118.800

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA1300 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 131.118.800

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 71.118.800

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA DAN KELEMBAGAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA DAN KELEMBAGAAN
3. NHK : 677629

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 620.000.000

1. Tanah Seluas 361 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI
Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/200 m2 di KOTA BANDA
ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 773.000.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 773.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **4 November 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : UNIT PELAKSANA TEKNIS DISBUDPAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUDHA FARSYAH
2. Jabatan : KEPALA UPTD MUSEUM ACEH
3. NHK : 677618

II. DATA HARTA

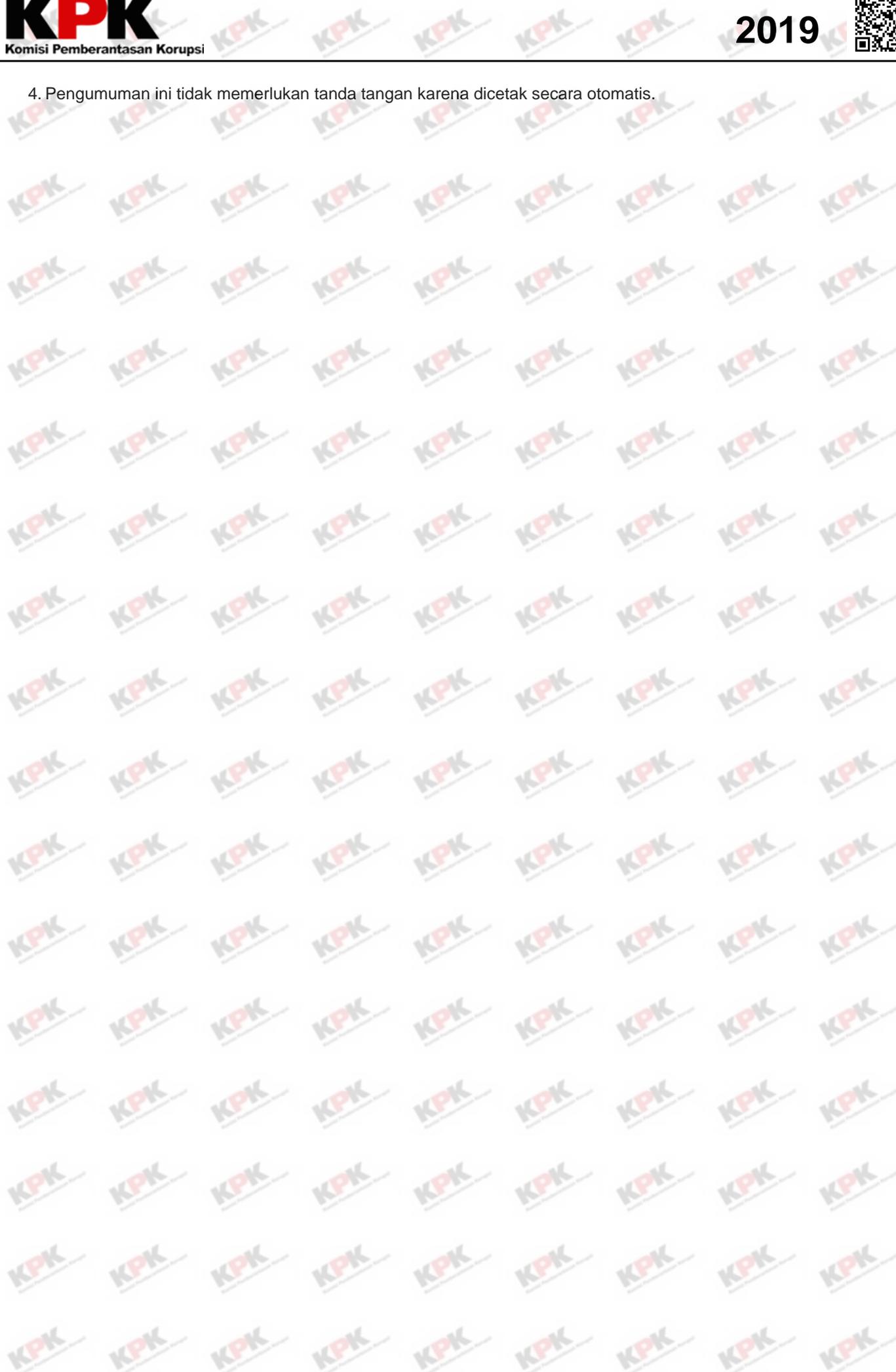
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 341 m2/341 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, SUZUKI AV141F Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	567.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	567.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **4 November 2019**



4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
SUB UNIT KERJA : UNIT PELAKSANA TEKNIS DISBUDPAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELLY ZUARNI
2. Jabatan : KEPALA UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA ACEH
3. NHK : 713435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/120 m² di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 430.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 430.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.